

TUGAS AKHIR

TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar ahli madya (A.Md)
pada Program Studi Administrasi perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau*



Oleh :

FATMAWATI

NIM: 00976008223

**PROGRAM DIPLOMA TIGA ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAS SYARIF KASIM
RIAU
2013**

ABSTRAK

TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) RODA DUA PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

Oleh:

FATMAWATI

00976008223

Penelitian ini dilaksanakan dan difokuskan terhadap pelaksanaan Tata Cara Penghitungan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Roda Dua Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupten Kampar. Khususnya untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar pada masyarakat dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan pendapatan pajak daerah, serta untuk mengetahui kebijakan apa yang diambil oleh kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah.

Ada permasalahan yang kerap terjadi dalam suatu negara atau daerah yaitu tentang perpajakan, karena sektor pajak dapat dikatakan sebagai gerbang dalam meningkatkan lajunya prekonomian suatu daerah. Namun harapan tersebut kerap tidak sejalan dengan kesadaraan masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar pajak.

Dari permasalahan tersebutlah penulis dapat memperoleh data yang diperlukan, dan selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode kuantitatif yaitu merupakan tehnik analisis data berupa statistik data digunakan yang berbentuk angka

Kata kunci : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum, wr, wb

Alhamdulillahirobbil'alamin penulis ucapkan, maha suci Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “ **Tata Cara Penghitungan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar** “. Sholawat serta salam tidak lupa penulis hadiahkan kepada Nabi junjungan alam Nabi besar SAW. Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya pada Program Diploma III Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada kesempatan ini Penulis sangat bersyukur karena dalam bentuk kehidupan ini masih diberi rahmat dan kesempatan oleh Allah Subhanahuata'ala maka penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua yang sangat spesial dalam hidup ini yaitu Ibunda tercinta Mardiana dan ayahanda Sarjono, dia adalah orang tua yang terbaik dalam memberikan tulus kasih sayang dan motivasi diri, semoga beliau bangga dengan keberhasilan ini.
2. Bapak DR. Mahendra Romous, SP.M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan contoh terbaik selaku pemimpin dan seorang yang patut dihargai.

3. Bapak Mahmuzar,M.Hum Selaku Ketua Jurusan D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Mustiqowati Ummul Fitriyani Selaku Sekretaris Jurusan D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah membantu atas kelancaran dan selesainya tulisan ini.
5. Bapak Alchudri, SE,AK,MM, CPA. Selaku Pembimbing yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya dalam penyelesaian tugas akhir ini . Serta ibu Bapak Dosen yang telah turut serta dalam memberikan masukan dan membantu penulis dalam memberikan ilmu pengetahuan yang teramat berguna, dan seluruh staf dan pegawai pada Fakultas Ekonomi yang telah banyak membantu kelancaran urusan dalam suasana keakraban dan kekeluargaan. Dalam hal ini penulis tidak mungkin dapat menyebutkan satu per satu nama mereka.
6. Pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar yang telah banyak memberikan kerjasamanya yang ikut dalam memberikan bantuan data ataupun lainnya dalam menyelesaikan tulisan ini.
7. Tak Lupa pula buat orang yang ku sayang Kakak dan Adek ku yang paling Aku hormati dan sangat aku banggakan dan Seluruh keluarga yang telah banyak memberikan motivasi dan dorongan dalam penyelesaian tugas akhir ini.
8. Buat Sobatku Maysarah,Reni Elfitri,Siti Nurahma, dan seluruh rekan-rekan administrasi perpajakan yang seperjuangan yang selalu menghibur dan memberi motivasi dalam segala hal.

9. Dan tak lupa kepada teman di kost wuji dara, indah, seseorang yang spesial di hati saya yang telah menghibur saya dan memberi semangat dalam mengerjakan tugas akhir ini sampai selesai.
10. Dan Kepada Semua pihak yang karena keterbatasan tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut adil selama penulisan ini. Semoga Allah SWT membalas segala ketulusan dan budi baik yang telah diberikan . Amin ya Rabbal'alam.

Hanya kepada Allah SWT Subhanahuta'ala penulis berdo'a dan bermohon semoga segala kebaikan dan jerih payah mereka semua mendapatkan balasan yang layak. Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua terutama bagi penulis. Amin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Pekanbaru, Maret 2012

Penulis

FATMAWATI
Nim. 00976008223

ABSTRAK

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Oleh : Maisarah

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Bengkalis yang berlangsung pada bulan April s/d Mei 2012. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tata cara pemungutan pajak sarang burung walet pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian menggunakan metode penelitian ini dengan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan observasi dan pengamatan langsung yakni mengetahui Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis:

Tata cara pemungutan pajak sarang burung walet di DIPENDA Kabupaten Bengkalis, dilakukan dengan 3 tahap yang dimulai dengan tahap penghimpunan data subjek dan objek pajak dengan data yang lengkap, selanjutnya tahap perhitungan pajak terutang sebagai perivikasi data yang disampaikan wajib pajak dalam SPTPD dan tahap penetapan yang dilakukan DIPENDA Kabupaten Bengkalis dalam bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Kata Kunci : Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
 BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Perumusan masalah.....	7
1.3 Tujuan dan manfaat penelitian	7
1.4 Metode peneitian	7
1.5 Sistematika penulisan	9
 BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
2.1 Sejarah singkat unit pelaksanaan teknis	11
2.2 Visi Dan Misi Kantor Unit Pelaksana Teknis	12
2.3 Struktur organisasi	12
2.4 Uraian tugas	13
 BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	
3.1 Tinjauan teori.....	15
3.1.1 Pengertian pajak	15
3.1.2 Pajak daerah.....	17
3.1.3 Jenis pajak daerah.....	19
3.1.4 Fungsi Pajak	19
3.1.5 Pengertian kendaraan bermotor	20
3.1.6 Pengertian pajak kendaraan bermotor	20
3.1.7 Dasar hukum pajak kendaraan bermotor	20
3.1.8 Subjek pajak kendaraan bermotor	21
3.1.9 Objek pajak kendaraan bermotor.....	22

3.1.10 Pengertian pajak bea balik nama kendaraan bermotor	22
3.1.11 Dasar hukum pajak bea balik nama kendaraan bermotor	22
3.1.12 Prosedur Tata Cara Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar ..	23
3.1.13 Perhitungan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	26
3.1.14 Sanksi Pelanggaran BBNKB	26
3.1.15 Pajak Menurut Syari'at Islam	27
3.2 Tinjauan praktek	29
3.2.1 Perhitungan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	30
3.2.2 Permasalahan Yang dihadapi Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Mengenai Tata Cara Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ...	34
3.2.3 Kebijakan dan Langkah-langkah Yang dilakukan Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Mengenai Tata Cara Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	37

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	39
4.2 Saran	40

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Daftar jumlah unit Kendaraan Bermotor yang membayar BBNKB di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Dari Tahun 2009 sampai Tahun 2011.....	3
-----------	--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peranan serta wajib pajak untuk secara langsung dan sama-sama ikut melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan pajak sebagai cermin kewajiban masyarakat itu sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak juga diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah, yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan kepada pembayarannya, sedangkan pelaksanaannya dimana perlu dapat dilaksanakan. Pemberian balas jasa dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk pemberian kepada seluruh masyarakat, seperti pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum, pembangunan sarana-sarana umum masyarakat dan sebagainya.

Pada, pasal 23 ayat 2 dari Undang-undang Dasar 1945 mengatakan "segala Pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang". Ini berarti bahwa di negara kita sesuatu pungutan Pajak harus berdasarkan Undang-Undang, yang lebih lanjut berarti harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Tarif pajak pada prinsipnya ditentukan oleh undang-undang perpajakan yang berlaku.

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, oleh karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotong royongan nasional sebagai peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional dan pembiayaan Negara.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pembangunan suatu daerah membutuhkan dana yang cukup besar, dalam pembangunan tersebut pemerintah telah berkontribusi pajak sebagai salah satu pendapatan yang paling besar untuk membangun suatu daerah. Dalam melaksanakan suatu pembangunan daerah Peran masyarakat sangat penting dalam

pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan perlu ditingkatkan dengan mendorong kesadaran dan pemahaman bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional serta salah satu kewajiban kenegaraan sehingga masyarakat wajib berperan aktif dalam melakukan kewajiban nya sendiri.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kabupaten Kampar mengenai jumlah kendaraan bermotor yang membayar Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) selama 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Daftar jumlah unit Kendaraan Bermotor yang membayar BBNKB di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Dari Tahun 2009 sampai Tahun 2011

Tahun	Jumlah Kendaraan (Unit)	Kategori berdasarkan cc Kendaraan (Unit)			Kendaraan Yang Membayar BBNKB	Kendaraan Yang tidak Membayar BBNKB
		110 cc	125 cc	135 cc		
2009	2.876	1.045	1271	560	1.197	1.679
2010	3.067	2.237	745	85	1.540	1.527
2011	4.953	2.198	1.560	1.195	2.960	1.993

Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

Berdasarkan tabel di atas menerangkan tentang jumlah pembayaran Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dalam tiga tahun terakhir. Dimana dari tahun 2009 jumlah kendaraan bermotor yang membayar BBNKB Yaitu 1.197 kendaraan, kemudian pada Tahun 2010 jumlah kendaraan bermotor yang membayar BBNKB yaitu sebanyak 1.540 dan pada tahun 2011 jumlah yang membayar 2.993 kendaraan bermotor yang membayar BBNKB.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama 3 tahun terakhir kesadaran masyarakat wajib pajak yang melakukan pembayaran Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor terus mengalami kondisi yang berfluktuasi bahkan sempat menurun pada tahun 2011, hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang tidak begitu serius dalam memiliki kendaraan bermotor, sehingga hanya untuk beberapa bulan saja kendaraan itu tidak diselesaikan pembayarannya kepada pihak lesing.

Perhitungan penulis menggunakan contoh kendaraan bermotor roda dua (motor) dengan plat Bandar Lampung yang didapat dengan membeli baru. Perhitungan kendaraan roda empat (mobil) tidak akan jauh berbeda. Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor terdapat pada Surat Ketetapan Pajak Daerah yang biasanya terdapat dibelakang STNK anda yang biasanya terdapat 4 kolom dan 6 baris. Akan lebih baik lihat perhitungan dibawah ini dengan langsung melihat STNK kendaraan anda.

Baris Pertama, tertera BBN KB yaitu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. BBN-KB biasanya akan terisi nilai X.XXX.XXX artinya anda telah melakukan pembayaran BBN-KB pada tahun kedua dan seterusnya sehingga tidak dikenakan biaya. Apabila anda membeli motor baru maka akan tertera besarnya BBN-KB tersebut. Besarnya BBN-KB adalah 10% dari Harga Motor *off road* anda. Contoh BBN-KB saya berjumlah Rp.440.000,- yang berarti nilai motor saya *off road* sebenarnya hanya Rp.4.400.000,- (dealer jual pada waktu promo Rp.6,5jt dan sekarang Rp.8,4jt). Jika anda membeli motor bekas (*second*) dan akan balik nama maka akan dikenakan BBN-KB. Besarnya BBN-KB ini sebesar $\frac{2}{3}$ x PKB anda.

Baris kedua, tertera PKB yaitu Pajak Kendaraan Bermotor. PKB ini bersifat menurun setiap tahunnya seiring berkurangnya nilai kendaraan anda. Biasanya samsat memiliki data tentang besarnya nilai kendaraan anda yang

berubah setiap tahunnya seiring penyusutan. PKB didapatkan dari $1,5\% \times \text{Nilai Jual Motor}$. PKB motor saya sebesar Rp.66.000,- yang berarti nilai jualnya Rp.4.400.000,- Bagi anda yang telat melakukan pembayaran pajak tahunan akan dikenakan denda dan akan penulis bahas ditulisan lain. Khusus bagi anda yang tinggal diwilayah DKI Jakarta, mulai tanggal 3 Januari 2011 berlaku peraturan baru berupa pajak progresif dimana perhitungan $1,5\%$ berlaku untuk kendaraan bermotor anda yang pertama. 2% kendaraan kedua. $2,5\%$ kendaraan ketiga, dan 4% untuk kendaraan keempat dan seterusnya. Sebagai contoh jika anda memiliki 3 kendaraan roda dua, maka kendaraan pertama dihitung $1,5\% \times \text{Nilai kendaraan}$. Kendaraan kedua $2\% \times \text{Nilai kendaraan}$, dan kendaraan ketiga $2,5\% \times \text{Nilai Kendaraan}$. Perhitungan ini berlaku sejenis, artinya jika anda memiliki 1 mobil dan dua motor maka mobil akan dikenakan pajak $1,5\%$. Sedangkan motor berlaku progresif ($1,5\%$ dan 2%)

Baris ketiga, tertera SWDKLLJ yaitu Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Pengelola SWDKLLJ ini adalah jasa raharja dan jika anda mengalami kecelakaan anda berhak meng-*claim* kepada jasa raharja. Untuk lebih jelas masalah *claim* anda bias mengunjungi situs jasa raharja. Besarnya SWDKLLJ adalah Rp.35.000,- dan apabila anda terlambat membayar pajak tahunan maka akan dikenakan tambahan denda sebesar Rp.32.000,-

Baris keempat, tertera Biaya Adm. STNK yaitu Biaya Administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan. Biaya ini akan dikenakan apabila anda membayar pajak 5 tahunan atau anda melakukan balik nama STNK. Besarnya biaya ini adalah Rp. 50.000,-

Baris Kelima, tertera Biaya Adm. TNKB yaitu Biaya Administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Biaya ini juga akan dikenakan apabila anda membayar pajak 5 tahunan atau anda melakukan balik nama STNK. Besarnya biaya ini adalah Rp. 30.000,-

Baris Keenam, tertera Total adalah seluruh jumlah yang timbul dari pajak ini. Jika anda membayar pajak diluar dari biaya ini maka dipastikan bahwa anda menjadi korban percaloan atau pihak yang memanfaatkan ketidaktahuan anda. Sebagai catatan apabila anda membayar pajak kendaraan bermotor berupa pajak tahunan (bukan 5 tahunan apalagi Balik Nama) maka biaya yang akan muncul hanya pada baris kedua (PKB) dan ketiga (SWDKLLJ) walaupun anda mengalami keterlambatan dalam membayarnya. Apabila anda melakukan pembayaran melalui jasa perpanjangan STNK maka akan ada tambahan jasanya.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti masalah pajak kendaraan bermotor khususnya yaitu pajak bea balik nama kendaraan bermotor karena dengan meningkatnya jumlah kepemilikan atas kendaraan bermotor, sebagian masyarakat atau wajib pajak khususnya yang mempunyai kendaraan bermotor banyak yang tidak mengerti bagaimana tata cara perhitungan pajak bea balik nama kendaraan bermotor, dengan alasan tersebutlah penulis mengambil judul tugas akhir **“Tata Cara Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar”**.

1.2 Perumusan Masalah

Adapaun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : ***Bagaimana Tata Cara Penghitungan Bea Balik Kendraan Bermotor Roda Dua Pada dinas pendapatan provinsi Riau kabupaten Kampar Bangkinang.***

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui tata cara penghitungan bea balik nama kendaraan bermotor sehingga wajib pajak atau masyarakat dapat melihat berapa jumlah pajak yang akan disetor ke kas Negara.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui tentang penghitungan pajak bea balik nama kendaraan bermotor kendaraan bermotor roda dua di kabupaten Kampar
- b. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menyempurnakan penghitungan pajak bea balik nama kendaraan bermotor
- c. Sebagai sarana informasi dan referensi bagi peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian terhadap objek yang sama.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Penelitian penulis ini dilakukan di kantor pada dinas pendapatan daerah kabupaten Kampar yang beralamat di jalan Letnan Boyak no 74 Bangkinang.

1.4.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan selama 1 bulan terhitung dari bulan maret sampai dengan Desember.

1.4.3 Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh penulis secara langsung melalui wawancara kepada para pegawai dan staff dinas pendapatan daerah kabupaten Kampar

2. Data sekunder

Adalah data yang penulis peroleh dalam bentuk laporan, catatan dan dokumentasi yang terkait melalui kantor penelitian

1.4.4 Metode Pengumpulan Data

1. Metode Observasi

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dengan cara mengamati langsung objek yang menjadi permasalahan dalam penerapan tata cara penghitungan pajak bea balik nama kendaraan bermotor di kabupaten Kampar.

2. Metode Wawancara

Penulis melakukan wawancara yaitu Tanya jawab langsung dengan karyawan atau staf dan berbagai narasumber untuk mendapatkan informasi bermanfaat.

1.4.5 Analisis Data

Penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan penjelasan yang bersifat kuantitatif yaitu merupakan teknik analisis data berupa statistik data digunakan yang berbentuk angka. Data yang penulis peroleh juga berupa dokumen ,kemudian data tersebut penulis olah sesuai dengan masalah pokok

penelitian dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat dengan diberi penjelasan ,selanjutnya dianalisis dan dibahas yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini, penulis susun kedalam masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab seperti di uraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK

Pada bab ini penulis membahas tentang pengertian pajak, pajak daerah, pajak kendaraan bermotor, dan tata cara penghitungan bea balik kendaraan bermotor.

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini mengemukakan sejarah singkat kantor dinas pendapatan daerah kabupaten Kampar, Visi dan misi, struktur organisasi, dan uraian tugas.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas dasar penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1.1 Sejarah Singkat Unit Pelaksanaan Teknis

Secara historis pada awalnya kantor UPT Pendapatan Provinsi Riau di bentuk berdasarkan SK Gubenur Kepala Daerah Tingkat 1 Riau No. Kpts. 29 Januari 1974 dan dengan perkembangan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan Pasal 49 Ayat 2 UU No 5 Tahun 1979 Tentang pokok – pokok Pemerintahan di Daerah melalui Perda No. 5 Tahun 1979 Yaitu Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dan sebagaimana terakhir dengan semangat Otonomi Daerah di dasarkan pada UU No. 22 Tahun 1999 di rubah menjadi Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

Berdasarkan amanat PP No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah maka sebagai Implementasinya di tetapkan Perda Provinsi Riau No. 9 Tahun 2008 Tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Data kerja Propinsi Riau (SOTK) diantaranya Dinas Pendapatan Provinsi Riau mempunyai kedudukan dan tugas Pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Azaz Otonomi Daerah dan tugas pembantu Bidang Pendapatan serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan Penyelenggaraan wewenang yang di perintahkan oleh Pemerintah kepada Gubenur selaku wakil Pemerintah dalam rangka Dekonsentrasi.

1.2 Visi Dan Misi Kantor Unit Pelaksana Teknis

Adapun Visi dan Misi Kantor UPT Kab. Kampar adalah sbb:

A. Visi

Terwujudnya pendapatan daerah sebagai pendukung utama kelancaran roda penyelenggaraan pemerintah propinsi riau secara profesional.

B. Misi

Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah secara optimal dan menyelenggarakan atau meningkatkan kinerja pelayanan publik secara profesional dan memperoleh dana perimbangan secara adil sesuai dengan potensi yang dimiliki.

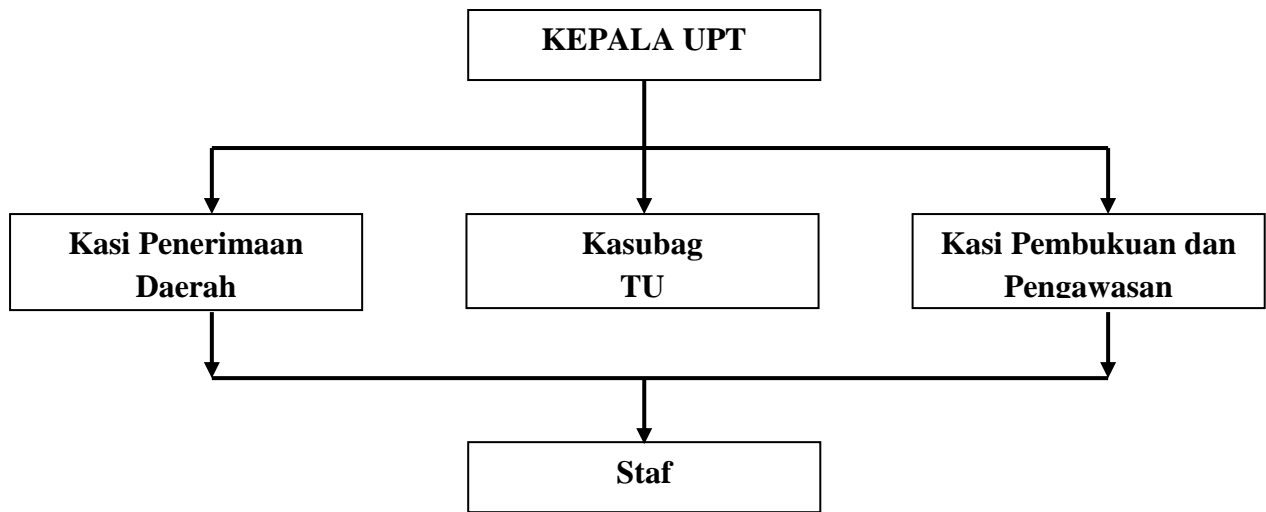
1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi terdiri dari beberapa bagian atau unit kerja yaitu sebagai berikut:

1. Kepala unit pelaksana teknis pendapatan kabupaten kampar
2. Kasi pembukuan dan pengawasan
3. Kasi penerimaan pendapatan daerah
4. Kasubag tata usaha
5. Staff

Gambar II.1

**STRUKTUR ORGANISASI UPT DIPENDA KABUPATEN KAMPAR
PROVINSI RIAU**



Sumber : Unit Pelaksanaan Teknis Provinsi Riau Kabupaten Kampar.

1.4 Uraian Tugas

Kantor Dinas UPT Pendapatan Daerah kampar Mempunyai tugas kerja masing Masing sesuai dengan bidang dan tugasnya sebagaimana telah ditentukan. Adapun tugasnya masing-masing seksi adalah sebagai berikut :

1. Nama Jabatan : Kepala Kantor

Tugas pokok dan fungsinya :

- a. Merumuskan rencana dan strategik dan program kerja dinas yang sesuai dengan visi dan misi Daerah.
- b. Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan program kerja dinas sesuai bidang tugasnya.
- c. Menyelenggarakan rencana strategik dan program kerja dinas.
- d. Menetapkan UPT pendapatan dan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.
- e. Menetapkan standar satuan harga dan analisis belanja daerah.
- f. Menetapkan UPT pendapatan tentang APBD.

- g. Menentukan pedoman evaluasi anggaran pendapatan dan belanja (APB) sesuai pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah.
- h. Menetapkan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah pengelolaan investasi dan asset daerah, kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan Mikro kabupaten, kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah.
- i. Menetapkan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintah yang menjadi tanggungjawab bersama.

2. Nama Jabatan : Kasubag Tata Usaha dan Kepala Seksi Penerimaan Daerah

Tugas pokok dan fungsinya :

- a. Tugas pokoknya adalah Melaksanakan pemungutan Retribusi, Penagihan Pajak dan Pendapatan asli Daerah Lainnya.
- b. Menyelenggarakan Pemungutan, Penetapan, Penagihan, Pembukuan dan Penyetoran Pajak Restribusi dan Pendapatan Daerah Lainnya.
- c. Memberikan laporan segala kegiatan setiap bulan selambat-lambatnya Tanggal 10 Bulan berikutnya.
- d. Memberikan saran – saran Pendapatan dan Pertimbangan mengenai usaha – usaha untuk meningkatkan Pendapatan Daerah kepada Dinas Pendapatan Provinsi Riau baik diminta atau tidak

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

3.1 TINJAUAN TEORI

3.1.1 Pengertian Pajak

Adapun beberapa definisi pajak yang dikemukakan beberapa ahli dibidang perpajakan antara lain:

Menurut *Prof. PJA. Adriani* Pajak adalah “Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari definisi Adriani ini terlihat bahwa pajak dianggap sebagai pengertian yang merupakan *spesies* dari sebuah *genus* berupa pungutan. Dengan demikian ruang lingkup pungutan lebih luas dari pada pajak. Didalam definisi tersebut terlihat bahwa dia menekankan fungsi butgeter (keuangan) pajak, sekalipun sebenarnya pajak masih mempunyai fungsi lain yang juga sangat penting yakni fungsi mengatur. Apa yang dikatakan oleh Adriani sebagai tidak mendapat prestasi kembali dari Negara ialah prestasi khusus yang erat hubungannya dengan pembayaran iuran itu.

Prestasi dari nagara berupa hak untuk menggunakan sarana dan prasana umum, Misalnya jalan dan jembatan, atau hak perlindungan atas keamanan dan ketertiban, tentara dan polisi, tentu saja akan diperoleh oleh para pembayar itu.

Akan tetapi dalam hal ini mereka memperoleh hal-hal tersebut tidak secara individual, Dan tidak ada hubungannya secara langsung dengan pembayaran pajak itu. Hal tersebut dapat dibuktikan dari adanya kenyataan bahwa mereka yang tidak ikut membayar pajak pun dapat mengenyam kenikmatannya.

Menurut *Soeparman Soemahamidjaja* Pajak adalah iuran wajib, Berupa uang atau barang, yang dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Menurut *Mardiasmo (2008)* pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut *Azhari (2010)* pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut *Prof. Dr. MJH Smeeths dalam H. Buhari (2008)* pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui nama-nama umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.

Dari berbagai definisi diatas tersebut dapat dikatakan adanya beberapa ciri atau karakteristik pajak, yaitu sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan adanya undang-undang ataupun peraturan pelaksanaannya.

2. Terhadap pembayaran pajak tidak ada *tegen* prestasi yang dapat ditunjukkan secara langsung.
3. Pemungutannya dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga ada istilah pajak pusat dan pajak daerah.
4. Hasil pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya digunakan untuk *public investment*.
5. Disamping mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukkan dana dari rakyat kedalam kas Negara (fungsi budgeter), pajak juga mempunyai fungsi lain, yakni fungsi mengatur.

3.1.2 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. (Mardiasmo 2009). Pajak Daerah dan Pajak Nasional merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat, sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberi beban yang adil.

Pajak Daerah diatur dalam :

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Yang dimaksud Daerah menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya tidak ada perbedaan pengertian yang pokok antara pajak pusat dan pajak daerah mengenai prinsip-prinsip umum hukumnya. Perbedaan yang ada hanya pada objek pajak, aparat pemungut dan pengguna pajak.

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

3.1.3 Jenis Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa pajak daerah terdiri dari beberapa jenis yaitu :

1. Pajak Propinsi yang terdiri dari :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air.
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- d. Pajak pengambilan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

2. Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari :

- a. Pajak Hotel.
- b. Pajak Restoran.
- c. Pajak Hiburan.
- d. Pajak Reklame.
- e. Pajak Penerangan Jalan.
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
- g. Pajak Parkir.
- h. Pajak Lain-lain.

3.1.4 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

3.1.5 Pengertian Kendaraan Bermotor

Siahaan (2005 : 137) Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua Janis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu manjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak

3.1.6 Pengertian Pajak Kendraan Bermotor

Pengertian pajak kendraan bermotor secara umum adalah pajak yang di pungut atas kepemilikan, penggunaan dan pengawasan kendraan bermotor. Marihot P. Siahaan (2005).

Pengertian pajak kendraan bermotor menurut undang-undang nomor 34 tahun 2000 adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendraan bermotor Liberti Pandiangan (2002).

3.1.7 Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar hukum pajak kendaraan bermotor sebagaimana disebutkan diatas adalah sebagai berikut :

3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB.

3.1.8 Subyek Pajak Kendaraan Bermotor

Subyek Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2001 adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang mrmiliki kendaraan bermotor.

Adapun yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor adalah :

1. Orang yang bersangkutan, yaitu sebagai pemilik sesuai dengan hak kepemilikannya.
2. Orang atau badan yang memperoleh kuasa dari pemilik kendaraan bermotor.
3. Ahli Waris, yaitu orang atau badan yang ditunjuk dengan surat wasiat atau yang ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan kesepakatan dan atau putusan pengadilan.
4. Wajib pajak baik perorangan atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor yang jumlah pajaknya seluruh atau sebagian belum dilunasi oleh pemilik lama, maka pihak yang menerima penyerahan tersebut juga bertanggung jawab terhadap pelunasan pajaknya.

3.1.9 Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. termasuk dalam objek PKB yaitu kepemilikan penguasaan kendaraan bermotor yang di gunakan disebuah jenis darat, antara lain, di kawasan bandara, pelabuhan laut, perkebunan, kehutanan, pertanian, industri dan sarana olahraga dan rekreasi.

3.1.10 Pengertian Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah/warisan dan pemasukan kedalam badan usaha. Penyerahan kendaraan bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah (termasuk hibah, wasiat dan hadiah), warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.

Bea balik nama adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak dan keadaan yang terjadi karena jual- beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. (Ahmad Yani 2002:47).

3.1.11 Dasar Hukum Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) saat ini didasarkan pada Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 dan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.

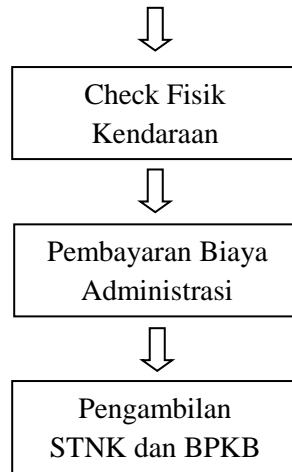
Selain itu, penerapan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada suatu daerah provinsi didasarkan pada peraturan daerah provinsi yang bersangkutan yang merupakan landasan hukum oprasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Provinsi yang bersangkutan serta keputusan Gubernur yang mengatur tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada provinsi yang dimaksud.

3.1.12 Prosedur Tata Cara Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

Adapun tata cara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Kabupaten Kampar dapat di lihat pada gambar 3.1 berikut ini :

Gambar 3.1
Bagan Proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)





Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kabupaten Kampar

Berdasarkan bagan di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pemohon melengkapi berkas untuk kepentingan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berupa BPKB Asli, STNK Asli, Kwintansi Jual Beli mobil Asli, KTP Asli pemilik yg akan di lakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor (BNKB).
2. Foto Copi BPKB Asli, STNK Asli, Kwintansi Jual Beli mobil Asli, KTP Asli pemilik yg akan di Balik Nama Kendaraan Bermotor (BNKB).
3. Mintalah formulir kosong dan isi dengan lengkap sesuai dengan data yang sebenarnya.
4. Setelah berkas lengkap serahkan ke Loker Pengumpulan data dan mengisi buku besar permohonan Balik Nama Kendaraan Bermotor (BNKB) yang berisi Nama lengkap, dan Jenis Layanan, dari sini mereka akan mengarahkan ke loket cek fisik.

5. Melakukan cek fisik kendaraan pada bagian cek fisik. Kemudian cocokkan hasil cek fisik berupa nomor rangka dan nomor mesin kendaraan dengan BPKB dan STNK yang asli.
6. Selanjutnya dibawa kembali ke Loker cek fisik dan minta tanda tangan persetujuan pejabat berwenang atas hasil cek fisik tersebut.
7. Lakukan pembayaran biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
8. Selanjutnya akan diberikan kembali STNK asli serta bukti pajak akan diberikan kembali kepada anda.
9. Menunggu pengambilan BPKB. Untuk proses ini umumnya bisa mencapai sekitar 3 hari dan pengambilannya harus membawa nomor tiket BPKB berserta KTP asli.

3.1.13 Penagihan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Jika wajib pajak telah melakukan pembayaran BBNKB sesuai dengan jangka waktu jatuh tempo pembayaran, maka tidak akan dilakukan penagihan, penagihan baru akan dilakukan apabila wajib pajak tidak melunasi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu pembayaran BBNKB, pelaksanaan penagihan BBNKB adalah dengan menerbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 30 (tiga puluh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak.

3.1.14 Sanksi Pelanggaran BBNKB

1. Administrasi BBNKB

Adapun sanksi administrasi BBNKB yang diberlakukan adalah sebagai berikut:

- a. Surat ketetapan pajak daerah yang tidak atau kurang bayar dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, ditagih melalui surat tagihan pajak daerah.
- b. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan pajak terutang dikenakan sanksi administrasi sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- c. Apabila kewajiban mengisi surat pemberitahuan pajak daerah tidak dipenuhi dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar sejak saat terhutangnya pajak.

2. Sanksi Pidana

Adapun sanksi pidana yang diberlakukan adalah sebagai berikut :

- a. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat di pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

- b. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat di pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang

3.1.15 Pajak Menurut Syari'at Islam

Allah SWT tidak membiarkan manusia saling menzhalimi satu dengan yang lainnya, Allah dengan tegas mengharamkan perbuatan zhalim atas diri-Nya, juga atas segenap makhluk.

Diantara bentuk kezhaliman yang hampir merata di tanah air kita adalah diterapkannya sistem perpajakan yang dibebankan kepada masyarakat secara umum, terutama kaum Muslimin, dengan alasan harta tersebut dikembalikan untuk kemaslahatan dan kebutuhan bersama.

Adapun dalil secara umum, yaitu firman Allah dalam surat annisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.s ANNISA : 29).

Dalam ayat diatas Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya.

Kaum muslimin sebagai pembayar pajak harus mempunyai batasan pemahaman yang jelas tentang pajak menurut pandangan islam, sehingga apa-apa yang dibayar merupakan hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah SWT.

Demikian juga bagi petugas pajak jika pajak itu sesuai syariat, maka apa yang ia lakukan tentu bernilai jihad baginya. Sebab sekecil apapun perbuatan akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT.

Secara Etimologi, pajak dalam bahasa arab disebut dengan istilah Dharibah, yang artinya : Beban. Ia disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaanya akan dirasakan menjadi sebuah beban(pikulan yang berat).

Ada sebuah hadis yang berbunyi “ *tidak masuk surga petugas pajak* “. Para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud petugas pajak ini adalah “ orang yang mengambil *ushr* dari harta kaum muslim secara paksa yang melampaui batas, sehingga dikhawatirkan dosa dan sanksi baginya.

Pajak yang dikenakan untuk kaum muslimin tidak diartikan sebagai kehinaan, karena segala aktifitas muslim yang mengikuti perintah Allah termasuk dalam nilai ibadah yang berarti kemuliaan.oleh sebab itu, pajak orang muslim

merupakan sebuah beban tambahan sebagai bentuk amal shaleh dan jihad mereka di jalan Allah karena adanya suatu kondisi khusus.

3.2 TINJAUAN PRAKTEK

Pada sub bab ini data yang telah dikumpulkan dianalisis berdasarkan variabel-variabel yang dikaji selanjutnya dikaitkan dengan teori yang ada. Proses analisis data ditujukan untuk menemukan suatu hasil atau hal apa yang sebenarnya terdapat di lokasi penelitian, sehingga peneliti dapat menarik suatu kesimpulan dari penelitian tersebut dan pada akhirnya peneliti dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait di dalamnya.

3.2.1 Cara Perhitungan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Dasar pengenaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), yang juga digunakan dalam ketentuan pajak kendaraan bermotor.

Tarif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), ditentukan berdasarkan tingkat penyerahan objek pajak yang terjadi dan jenis kendaraan bermotor yang diserahkan. Tingkat penyerahan kendaraan bermotor meliputi penyerahan pertama (yang berarti kendaraan baru), penyerahan kedua dan selanjutnya (yang berarti penyerahan atas kendaraan bekas), dan penyerahan karena warisan.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2001 Pasal 17 menentukan tarif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar:

- a) 10 % untuk kendaraan bermotor bukan umum
- b) 10 % untuk kendaraan bermotor umum
- c) 3 % untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

Tarif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas penyerahan kedua dan selanjutnya sebesar :

- a) 1 % untuk kendaraan bermotor bukan umum
- b) 1 % untuk kendaraan bermotor umum
- c) 0,3 % untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

Tarif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas penyerahan karena warisan ditetapkan sebesar:

- a) 0,1 % untuk kendaraan bermotor bukan umum
- b) 0,1 % untuk kendaraan bermotor umum
- c) 0,03 % untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

Secara umum perhitungan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Kendaraan Bermotor.}\end{aligned}$$

Berikut adalah contoh perhitungan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor :

Nomor registrasi : BM 3067 QN

Nama pemilik : MUHAMMAD FADLI

Type : YAMAHA MIO AL115S A/T

Tahun pembuatan : 2010

Pajak Kendaraan Bermotor yang tertera di STNK: Rp 1.127.500

Rincian Perhitungan:

BBNKB: Rp 950.000

(Pajak Terutang = Tarif Pajak X Nilai Jual Kendaraan Bermotor)

Pajak Terutang= 10 % X Rp 9.500.000

= Rp 950.000

PKB = Rp 142.500

SWDKLLJ = Rp 35.000

Total Pajak Terutang = Rp 1.127.500

Ket:

BBNKB = Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

PKB = Pajak Kendaraan Bermotor

SWDKLLJ = Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan.

Berikut adalah contoh perhitungan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor untuk pihak kedua :

Nomor registrasi : BM 3574 WC

Nama pemilik : PONIMAN

Type : HONDA NF 125 TD

Tahun pembuatan : 2011

Pajak Kendaraan Bermotor yang tertera di STNK: Rp 175.500

Rincian Perhitungan:

BBNKB: Rp 80.000

(Pajak Terutang = Tarif Pajak X Nilai Jual Kendaraan Bermotor)

Pajak Terutang= 1 % X Rp 8.000.000

= Rp 80.000

PKB = Rp 175.500

SWDKLLJ = Rp 35.000

Total Pajak Terutang = Rp 290.500

Ket:

BBNKB = Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

PKB = Pajak Kendaraan Bermotor

SWDKLLJ = Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan.

Berikut adalah contoh perhitungan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor karena warisan:

Nomor registrasi : BM 2545 WH

Nama pemilik JUPIR TANIANSYAH

Type : YAMAHA MIO AL115S A/T

Tahun pembuatan : 2011

Pajak Kendaraan Bermotor yang tertera di STNK: Rp 142.500

Rincian Perhitungan:

BBNKB: Rp 9.000.000

(Pajak Terutang = Tarif Pajak X Nilai Jual Kendaraan Bermotor)

Pajak Terutang= 0.1 % X Rp 9.000.000

= Rp 9.000

PKB = Rp 142.500

SWDKLLJ = Rp 35.000

Total Pajak Terutang = Rp 186.500

Ket:

BBNKB = Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

PKB = Pajak Kendaraan Bermotor

SWDKLLJ = Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan.

Sedangkan untuk contoh perhitungan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor untuk pihak kedua :

Nomor registrasi : BM 3574 WC

Nama pemilik : PONIMAN

Type : HONDA NF 125 TD

Tahun pembuatan : 2011

Pajak Kendaraan Bermotor yang tertera di STNK: Rp 175.500

Rincian Perhitungan:

BBNKB: Rp 80.000

(Pajak Terutang = Tarif Pajak X Nilai Jual Kendaraan Bermotor)

Pajak Terutang= 1 % X Rp 8.000.000

= Rp 80.000

PKB = Rp 175.500

SWDKLLJ = Rp 35.000

Total Pajak Terutang = Rp 290.500

Ket:

BBNKB = Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

PKB = Pajak Kendaraan Bermotor

SWDKLLJ = Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan.

3.2.2 Permasalahan Yang dihadapi Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Mengenai Tata Cara Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kabupaten Kampar mengenai jumlah kendaraan bermotor yang membayar Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) selama 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Daftar jumlah unit Kendaraan Bermotor yang membayar BBNKB di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Dari Tahun 2009 sampai Tahun 2011

Tahun	Jumlah Kendaraan (Unit)	Kategori berdasarkan cc Kendaraan (Unit)			Kendaraan Yang Membayar BBNKB	Kendaraan Yang tidak Membayar BBNKB
		110 cc	125 cc	135 cc		
2009	2.876	1.045	1271	560	1.197	1.679
2010	3.067	2.237	745	85	1.540	1.527
2011	4.953	2.198	1.560	1.195	2.960	1.993

Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

Berdasarkan tabel di atas menerangkan tentang jumlah pembayaran Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dalam tiga tahun terakhir. Dimana dari tahun 2009 jumlah kendaraan bermotor yang membayar BBNKB Yaitu 1.197 kendaraan, kemudian pada Tahun 2010 jumlah kendaraan bermotor yang membayar BBNKB yaitu sebanyak 1.540 dan pada tahun 2011 jumlah yang membayar 2.993 kendaraan bermotor yang membayar BBNKB.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama 3 tahun terakhir kesadaran masyarakat wajib pajak yang melakukan pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terus mengalami kondisi yang berfluktuasi bahkan sempat

menurun pada tahun 2011. Hal ini disebabkan karena kondisi sebagian masyarakat yang belum memiliki kemampuan untuk membayar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, tidak mengetahui prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan banyak pembeli yang tidak serius dalam memiliki Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan kondisi tersebut, diketahui bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kabupaten Kampar mengenai jumlah kendaraan bermotor yang membayar Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di antaranya sebagai berikut :

1. Banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui prosedur Proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui prosedur Proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menyebabkan masyarakat enggan untuk melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dampak negatif yang timbul adalah rendahnya tingkat pendapatan dari pengurusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor meskipun sebenarnya wajib pajak sendiri telah memiliki uang yang cukup untuk melakukan Proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB).

2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan Proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan Proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) akan menyebabkan

banyaknya Kendaraan Bermotor (KB) yang tetap menggunakan nama pemilik lama meskipun kendaraan tersebut sudah selesai dari pembayaran angsurannya. Kondisi tersebut terjadi dikarenakan proses balik nama Kendaraan Bermotor harus dilengkapi dengan KTP pemilik pertama. Bagi pemilik Kendaraan Bermotor yang melakukan pembelian Kendaraan Bermotor secara Seken (bekas), maka hal tersebut akan mempersulit pemilik Kendaraan Bermotor untuk melakukan proses Bea Balik Nama.

3.2.3 Kebijakan dan Langkah-langkah Yang dilakukan Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Mengenai Tata Cara Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Terkait dengan beberapa kendala yang dialami oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Mengenai Tata Cara Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar sendiri melakukan beberapa kebijakan atau langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas yang memiliki Kendaraan Bermotor (KB) untuk melakukan proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan salah satu cara sederhana yang dapat dilakukan oleh pihak terkait dalam mengedukasi masyarakat tentang bagaimana sebenarnya proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan arti pentingnya melakukan proses Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor (BBNKB), sehingga masyarakat tidak merasa enggan untuk melakukan proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Dengan banyaknya cara dan kemudahan yang ditawarkan oleh pihak Dinas Pendapatan mengenai proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), diharapkan masyarakat tidak lagi enggan untuk melakukan proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang mereka miliki.

2. Memberikan Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi umumnya sangat dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Hal ini dikarenakan administrasi merupakan langkah awal dalam melakukan proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Jika secara administrasi dipersulit dan harus benar-benar lengkap, maka masyarakat tentu akan berusaha untuk segera melakukan proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Mengenai Tata Cara Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum, proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar secara keseluruhan sudah baik, hanya perlu dilakukan hubungan kerja sama dengan beberapa pihak terkait agar proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bisa dilakukan di tempat-tempat resmi yang dapat membantu masyarakat dalam melakukan proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
2. Secara umum masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan *edukasi* kepada masyarakat tentang arti pentingnya proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), memberikan kemudahan dalam proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka untuk mengatasi rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam melakukan proses Bea Balik Nama Kendaran Bermotor (BBNKB), maka proses Bea Balik Nama Kendaran Bermotor (BBNKB) perlu disampaikan di awal pada saat masyarakat melakukan pembelian Kendaraan Bermotor (KB).
2. Pihak Dealer dan Pihak Perusahaan Pembiayaan seharusnya diberi kewenangan untuk membantu melakukan proses Bea Balik Nama Kendaran Bermotor (BBNKB), sehingga masyarakat cukup datang saja ke Dealer tempat masyarakat melakukan pembelian Kendaraan Bermotor atau datang ke Perusahaan Pembiayaan tempat dimana masyarakat melakukan angsuran bulanan atas Kendaraan Bermotor (KB) yang dibelinya.

DAFTAR PUSTAKA

Y. Pudiyatmoko, *Penghantar hukum pajak*, Jogjakarta, Maret 2009

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah beserta penjelasannya

Soeparman soemahamidjaja, *Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong*, Bandung, Tahun 1964

Adriani dalam santoso brotodihardjo, *Penghantar Ilmu Hukum Pajak*, Tahun 1991

Marihot p. Siahaan, *Pajak daerah dan retribusi daerah*, Jakarta, PT raja grafindo persada, tahun 2005

Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Bohari. *Pengantar perpajakan*. Ghalia Indonesia, Jakarta 1985

Azhari. *Perpajakan I (pajak Penghasilan)*. UR Press Pekanbaru, tahun 2010

Mardiasmo. *Perpajakan* edisi Revisi 2008